

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Assiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2007).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia 2013).
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Gubernur Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia, 2007).
- Lubis, Solly. *Perkembangan Garis Politik dan Per-Undang-Undangan Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Alumni, 1983).
- Rosidin, Dr. H. Utang, S.H., M.H. ; pengantar, Ismatullah, Prof. Dr. H. Deddy, S.H., M.Hum. *Otonomi daerah dan desentralisasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sunindhia, Y.W. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1987).
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan*. (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
- Triwulan, Titik. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

ABD Rais Amar, Kedudukan Gubernur, *Jurisprudentie*, Volume 2, 2015.

Bunga Lirviana Sori, Tugas dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 No.3, 2016.

Dinoroy Marganda Aritonang, Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12 No.2, 2017

Muhammad Andi Yhuniar, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 No.4, 2016.

Nurlina Br Siregar, Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, *Jurnal Online Mahasiswa Hukum*, Volume 2 No.1, 2015.